

DIPLOMASI DIGITAL: STRATEGI DAN AKTOR BARU DALAM KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI

Muhammad Iqbal
FISIP Universitas Jember
cacakiqbal@gmail.com; muhammadiqbal.fisip@unej.ac.id

ABSTRAK

Abstrak. Artikel ini mendiskusikan penggunaan diplomasi digital baik oleh aktor negara maupun non-negara di tengah terbentuknya struktur baru dalam masyarakat jaringan dan kompleksitas isu persoalan global. Arus deras globalisasi dan disrupsi teknologi mengubah pola komunikasi politik dan beragam interaksi sosial serta memperpendek jarak transaksi komunikasi antara orang di seluruh dunia. Bahkan Frances Cairncross menegaskan transformasi pembangunan dunia ini sebagai “kematian jarak” (the death of distance). Bertolak dari pemikiran mengenai Strukturasi oleh Anthony Giddens dan Masyarakat Jaringan (network society) dari Manuel Castells dan dengan metode literature review atau studi dokumentasi, artikel ini akan mengeksplorasi signifikansi diplomasi digital baik yang difungsikan untuk diseminasi kepentingan nasional suatu negara maupun advokasi kepentingan global sejalan dengan makin berkembangnya softpower diplomacy. Hasil temuan penting yang perlu dijadikan perhatian bersama adalah diplomasi digital telah menciptakan strategi, struktur dan aktor-aktor baru yang dinilai terlalu bagus untuk dilewatkan begitu saja. Diplomasi menghadapi global warming oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Al Gore dan penggunaan beragam platforms media sosial oleh para pemimpin dunia atau termasuk Kementerian Luar Negeri Indonesia telah membentuk struktur kontestasi baru dalam masyarakat jaringan. Artikel ini menyimpulkan bahwa diplomasi digital sangat potensial untuk meningkatkan dan memperkuat agenda diplomatik baik untuk kepentingan kelompok aktor-aktor baru dan berbagai isu-isu baru.

Kata kunci: Diplomasi Digital, Twitter Diplomacy, Disrupsi Teknologi, Strukturasi Masyarakat Jaringan.

PENDAHULUAN

Diplomasi dan kebijakan luar negeri diformulasikan serta dijalankan dengan tujuan utama untuk mempertemukan kepentingan nasional suatu negara dengan lingkungan internasionalnya yang selalu mengalami dinamika perubahan. Penerapan politik luar negeri suatu negara dikenal dengan sebagai diplomasi. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 357), maka diplomasi diartikan sebagai: 1) urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain; 2) urusan kepentingan sebuah negara dengan perantara wakil-wakilnya di negeri lain; 3) pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dan negara; serta 4) kecakapan menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan (dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya). Sedangkan Diplomat adalah orang yang berkecimpung dalam bidang diplomasi (menteri luar negeri, duta besar, dsb).

Kebijakan politik luar negeri suatu negara mempunyai dua elemen fundamental yaitu tujuan nasional yang hendak dicapai yang terwujud dalam agenda kepentingan nasional (national interest) dan instrumen untuk mencapai tujuan nasional tersebut yang tercermin dari strategi diplomasi sebagai implementasi kebijakan politik luar negeri.

Trajektori diplomasi dalam studi hubungan internasional (HI) jalur lintasannya semakin berkembang mengikuti dinamika perubahan geopolitik kekuatan (power), sistem, struktur dan interaksi sosial di pusran persaingan global. Dimulai dari trajektori hard power dan soft power lalu di era digital ini menjadi diplomasi smart power.

Seorang diplomat bisa saja dianalogikan seperti seorang pemanah. Diplomasi yang sukses ibarat panah yang menancap sempurna pada bidang target. Kemahiran pemanah semacam itu

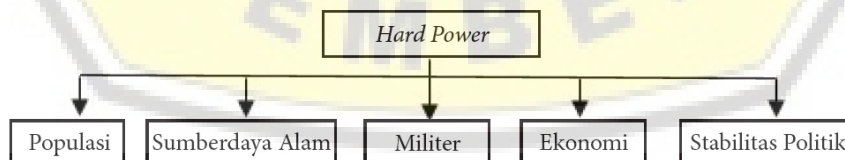
perlu keterpaduan dan kombinasi penguasaan fokus, teknik dan juga seni. Termasuk kedisiplinan dan latihan intensif serta update dengan teknik-teknik baru. Demikian pula dengan diplomat semakin dituntut daya adaptif dan kreatif di tengah makin pesatnya disrupsi teknologi dalam revolusi industri gelombang keempat. Perkembangan strategi dan seni diplomasi semakin menyesuaikan diri dengan dinamika pesatnya teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Technology/ICT). Seni dan kemampuan diplomasi efektif yang dilakukan oleh diplomat secara umum dapat mengadopsi trajektori gaya kepemimpinan efektif dalam mengelola sumber daya power sebagaimana yang terbaca dalam Tabel 1 dari konsep kontemplatif Joseph Nye berikut ini:

Tabel 1. Gaya Kepemimpinan Efektif: Keterampilan *Hard Power*, *Soft Power*, dan *Smart Power*

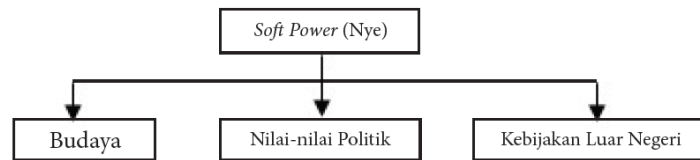
<p>Smart Power (Kombinasi)</p> <p>1. Kecerdasan Kontekstual (keterampilan berpolitik secara luas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat memahami keterlibatan lingkungan • Daya kreasi atas tren terkini • Daya adaptasi pada konteks dan kebutuhan publik
<p>Soft Power (Inspirasional)</p> <p>1. Kecerdasan emosional</p> <p>2. Kecerdasan Komunikasi</p> <p>3. Visi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mengelola hubungan dan kharisma • Kesadaran dan kontrol diri secara emosional • Daya persuasif mengolah makna kata, simbol • Daya persuasif menjangkau masyarakat • Daya atraksi kepada masyarakat
<p>Hard Power (Transaksional)</p> <p>1. Kapasitas organisasional</p> <p>2. Cara-cara Machiavellian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola sistem informasi • Mengelola sirkulasi sumberdaya internal dan eksternal • Kemampuan mem-bully, membeli dan tawar-menawar • Kemampuan membangun dan mempertahankan koalisi kemenangan

Sumber: Adaptasi dari Nye, Joseph S. (2008). *The powers to lead*. Oxford, New York: Oxford University Press. Hal. 83.

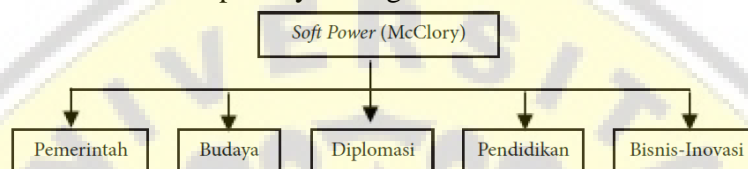
Secara historis, penggunaan hard power suatu negara diukur dan ditandai dengan sejumlah kriteria kekuatan yang dimiliki negara tersebut yakni: Besaran populasi, Sumberdaya alam, Kekuatan militer, dan Kekuatan ekonomi, dan Stabilitas sosial (Nye dan Armitage, 2007: 6 dalam Raimzhanova, 2015: 7). Ilustrasi kelima pilar kekuatan hard power adalah sebagai berikut:



Memahami *soft power* apabila mengacu dari Nye (2008) yang dapat kita jumpai dalam artikelnya yang berjudul “*Public Diplomacy and Soft Power*” *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616 (94). *Soft power* terutama berkaitan dengan tiga pilar sumberdaya kekuatan, yaitu kekuatan Budaya (di berbagai ruang yang atraktif kepada pihak lain), kekuatan Nilai-nilai politik (baik secara domestik maupun global), dan kekuatan Kebijakan luar negeri (ketika kebijakan memiliki legitimasi dan pengaruh moral yang kuat). Konseptualisasinya dapat diilustrasikan seperti ini:



Kemudian Jonathan McClory (2011: 10 dalam Raimzhanova, 2015: 7) memperluas tiga pilar Nye dengan memodifikasi menjadi lima pilar kekuatan soft power, yaitu: Pemerintah (nilai-nilai politik negara), Budaya (praktik produksi makna untuk masyarakat), Diplomasi (kebijakan luar negeri), Pendidikan, dan Inovasi-Bisnis. Studi McClory dengan menempatkan elemen Pendidikan di luar sumberdaya kekuatan Budaya karena menurutnya kuantitas dan kualitas karya publikasi pendidikan tinggi dipandang memiliki dampak (impact factor) yang signifikan untuk meningkatkan indeks pembangunan soft power. Ia juga menambahkan Inovasi-Bisnis sebagai pilar kekuatan baru karena daya atraktifnya bagi model ekonomi negara yang makin terbuka dan berkapasitas inovatif. Ilustrasi konseptualnya sebagai berikut:

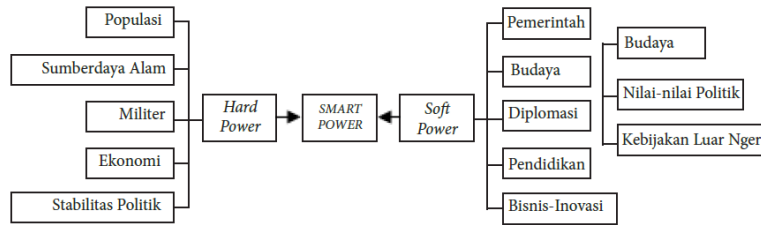


Penggunaan instrumen diplomasi dalam perspektif soft power Joseph Nye di era disrupsi teknologi atau Revolusi Industri gelombang keempat berubah atau memunculkan konsep smart power. Ketika realitas politik dan isu global dalam konteks dinamika hubungan internasional semakin kompleks, dinamis dan saling tarik menarik bahkan terjadi benturan kepentingan, maka pada titik perentangan ruang-waktu (time-space distanciation) diplomasi smart power menjadi sangat penting dan signifikan. Artinya, jika diinterpretasikan berdasarkan tesis Giddens (1984: 171) mengenai time-space distanciation, proses diplomasi smart power berupaya untuk merentangkan atau memperluas daya jangkau pesan-pesan diplomatik kepada sistem-sistem sosial dan sistem global melintasi ruang-waktu, tentu saja dengan cara mengintegrasikan setiap isu global dan sistem yang tersedia. Integrasi sistem yang dimaksud adalah adanya hubungan timbal-balik antarpelaku individu atau kelompok (aktor-aktor diplomasi) dalam rentangan ruang-waktu yang semakin luas dan terus diperluas, bahkan bisa tanpa kehadiran satu sama lain (have no needs face-to-face communication).

Diplomasi smart power sesungguhnya bukanlah model serba baru dan lalu meninggalkan atau meniadakan penggunaannya dari model lama secara terpisah. Namun sebaliknya, smart power diplomacy justru merupakan strategi diplomasi yang mengombinasikan kapasitas dan kapabilitas hard power dan soft power secara bersamaan tergantung pada situasi dan konteksnya.

Dalam istilah komunikasi politik dengan pendekatan analisis wacana (discourse analysis) misalnya, suatu realitas politik atau isu global selalu memiliki paduan tiga unsur utama yang bertali-temali antara teks, konteks, dan makna. Pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang realitas politik maupun isu global diharuskan pula untuk memahami keseluruhan dari tiga unsur wacana tersebut. Faktanya, dalam studi Hubungan Internasional, perbedaan klasik antara kelompok realis dan liberalis dalam memandang realitas politik atau isu global sangat mungkin menjadi tidak begitu tegas, malah cenderung makin kabur (becomes blurred, istilah Nye). Baik diplomasi hard power dan soft power keduanya saling berinteraksi dan saling memperkuat satu sama lain (Nye, 1990; Nye, 2004).

Maka, smart power merupakan perpaduan kombinasi penggunaan hard power dan soft power yang keduanya merepresentasikan kemampuan dan kekuatan untuk mencapai tujuan (national interest: –penulis) yang diinginkan dengan strategi utama mempengaruhi perilaku orang lain dengan mengikutsertakan daya kreasi inovatif dan daya adaptasi tinggi pada apa yang tengah warga dunia atau masyarakat global sedang butuhkan (Nye, 2004).



Lebih lanjut Nye dan Armitage menegaskan bahwa "The ability to skilfully combine hard and soft power for the development of integrated strategies is called smart power". Kemampuan untuk secara terampil menggabungkan hard power dan soft power untuk pengembangan strategi-strategi (diplomasi) yang saling terintegrasi (Nye dan Armitage, 2007: 7 dalam Raimzhanova, 2015: 14). Dengan kata lain, diplomasi smart power adalah kapasitas yang harus dipunyai oleh aktor-aktor diplomasi di era Revolusi Industri 4.0 yang mampu menggabungkan unsur-unsur hard power dan soft power agar mencapai tujuan diplomasi secara efektif dan efisien. Soft power saja mungkin tidak cukup karena kepentingan strategis dari hard power bisa jadi akan terus meningkat (McClory, 2011: 24). Smart power berupaya mengartikulasikan semua keunggulan dari hard power, seperti militer yang kuat, dikombinasikan dengan berbagai investasi sumberdaya dalam suatu aliansi, kemitraan strategis (strategic partnerships) dan institusi. Jika hard power adalah 'push' dan soft power adalah 'pull', maka kombinasi dari keduanya ini memungkinkan mencapai hasil maksimal dengan cara yang sah, itulah smart power yang saat ini tengah banyak diterapkan oleh banyak aktor diplomasi baik dari kalangan state actors maupun non-state actors. Inilah dasar konseptualisasi dari artikel ini yang hendak penulis eksplorasi menjadi diskusi bahasan tentang diplomasi digital.

Dunia saat ini memang sedang bergerak menuju revolusi digital. Adagium terkenal di abad informasi menyatakan: "siapa yang mampu menguasai informasi, akan mampu menguasai dunia." Maka di era digital saat ini arus deras informasi yang melimpah dan tersedia setiap saat bahkan real-time dengan daya akses yang mudah, cepat dan relatif murah hanya dengan sentuhan jari. Adagium tersebut dalam konteks diplomasi digital barangkali dapat kita ubah menjadi: "siapa yang dapat mengelola informasi dengan baik maka akan unggul berdiplomasi".

Maka, beberapa pertanyaan penting dan mendasar yang mengemuka dalam kajian ini adalah: "Apa dan bagaimana konseptualisasi dari diplomasi digital itu?" "Apa saja urgensi diplomasi digital dalam proses pembentukan strategi diplomasi?" "Siapa saja yang telah dan potensial sebagai aktor-aktor yang menggunakan diplomasi digital untuk merumuskan kebijakan politik luar negeri?" Seperti apa relasi yang terbentuk di antara struktur-struktur dan agen-agen dalam diplomasi digital?" Untuk memperoleh jawaban atas semua pertanyaan tersebut, kajian ini akan menerapkan metode penelitian yang akan diuraikan berikut ini. Barulah kemudian pada bagian pembahasan artikel ini akan mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sumber referensi serta dokumentasi yang telah penulis peroleh.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini merupakan kajian yang bersifat eksploratif, deskriptif dan interpretatif. Tujuannya hendak mengeksplorasi perkembangan diplomasi digital yang dalam rentang waktu lima tahun belakangan ini yang semakin banyak diimplementasikan oleh banyak aktor-aktor diplomasi. Indonesia sebagai kelompok *middle power* yang mana tugas pokok dan fungsi diplomasi berada di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pun relatif baru dua-tiga tahunan sejak 2017 mulai mengembangkan strategi diplomasi digital. Sementara di kelompok negara-negara maju sudah sekitar satu dekade ini sudah gencar menerapkannya.

Sebagai bahasan yang bersifat deskriptif, tentu artikel ini tidak memfokuskan pada aspek kausalitas, tetapi lebih melihat bagaimana konsep diplomasi digital dalam konteks perkembangan disrupsi teknologi, di mana populasi warga dunia kian besar jumlahnya yang berada dalam apa yang disebut oleh Manuel Castells (2010) sebagai "*the rise of network society*", terasa makin banyak menimbulkan minat dan perhatian banyak aktor-aktor diplomasi untuk terus dikem-

bankan. Berdasarkan pijakan eksplorasi awal itu kemudian merekonstruksi kembali penerapan dan potensi serta tantangan yang ada pada diplomasi digital ketika terejawantahkan menjadi strategi diplomasi dan kebijakan politik luar negeri.

Dalam studi HI pendekatan demikian sering disebut dengan pendekatan konstruktivis. Dalam pendekatan ini konsep diplomasi digital diinterpretasikan sebagai kontinuitas strategi diplomasi yang lahir melalui proses penafsiran atau kontestasi diskursus yang lebih tepat yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan luar negeri dari satu periode ke periode administrasi lainnya. Sebagai sebuah proses, diskursus kontestan dalam diplomasi digital berpusat di seputar pembentukan identitas *network society* dan *the identity of power* (Castellian), dalam aspek strukturasi (Giddens) yang tengah mengalami disrupsi teknologi. Inilah kontestasi yang komprehensif yang mulai dieksplorasi dalam artikel ini untuk selanjutnya diinterpretasikan guna menentukan pengertian mana yang menjadi lebih adaptif dan diterima oleh aktor-aktor diplomasi. Kebijakan politik luar negeri suatu negara dengan identitas hegemonik diyakini akan membuat keputusan politik (*decision making process*) yang diambil terlihat logis, tepat dan penting bagi kepentingan nasional suatu negara. Mengacu pada Klotz (2004) berbagai interpretasi dan perdebatan yang muncul merupakan bagian dari wacana identitas yang erat kaitannya dengan perumusan peran dan strategi diplomasi yang akan dimainkan dalam hubungan luar negeri negara tersebut (Patriadi, Hara, Iqbal, 2016).

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka desain dan metodologi penulisan dirancang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan berbagai data, permasalahan, kebijakan dan program-program yang terkait dengan konsepsi diplomasi digital. Unit analisis utama dalam penelitian ini adalah wacana atau diskursus yang dihasilkan dalam tulisan maupun ucapan para aktor pembuat kebijakan luar negeri dan tokoh-tokoh nasional maupun global sebagai representasi baik dari lembaga negara (*state*) maupun individu/kelompok (*non-state*) yang memiliki kewenangan langsung (*first hand policy*) dalam kaitannya dengan proses diplomasi digital yang tengah diimplementasikan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini studi dokumentasi atau studi pustaka (*state of the art* dari literatur diplomasi) yang dilakukan dengan cara membaca dokumen, memindai content dari laman *website* atau *platform* media digital, membaca teks-teks pidato atau *official statements*, berita maupun berbagai laporan (*report review*) serta mengkaji dan meneliti berbagai data dan dokumen yang terkait langsung dengan diplomasi digital. Kemudian temuan data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik Interactive Model Analysis dari Miles dan Huberman (1994). Teknik analisis data ini membagi langkah-langkah berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*), kemudian menginterpretasikannya dan menarik simpulan sesuai dengan fokus tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital dan terbentuknya masyarakat jaringan adalah takdir yang harus kita terima dan menghadapinya dengan tetap bijaksana. Menolak kehadirannya sama saja dengan menolak adanya takdir kehidupan. Memang sering kita jumpai tidak sedikit dampak buruk yang diakibatkan oleh teknologi internet di era serba digital. Namun banyak juga beragam manfaat dan dampak positif yang membuat hampir seluruh kebutuhan hidup kita menjadi lebih efektif dan produktif akibat teknologi informasi dan komunikasi. Sama halnya dengan sifat alamiah kehidupan selalu ada dua sisi, tidak jarang berada di titik nadir keburukan, tetapi juga begitu banyak kebaikan dan prestasi gemilang dicapai. Pendek kata masih jauh lebih banyak jumlah manusia dan masyarakat yang baik dibanding sebaliknya. Maka, takdir kehadiran era digital pun sudah seharusnya bukan untuk dikritisi, diabaikan lalu ditinggalkan. Sebaliknya, kehadirannya harus disikapi lebih cerdas dan bijaksana agar kebermanfaatannya dengan prestasi gemilang yang sangat produktif dapat kita capai.

Begitu pula dengan para pelaku diplomasi di era digital ini. Sudah seharusnya mengembangkan berbagai kreasi dan inovasi secara cerdas untuk berdaya adaptif yang tinggi hingga mampu menjangkau masyarakat jaringan atas pesan-pesan dan tujuan diplomasi yang hendak

dicapainya. Sebagaimana uraian di awal mengenai diplomasi smart power, para aktor atau pelaku diplomasi pun dituntut untuk siap menghadapi tantangan itu agar lebih cerdas dalam berdiplomasi. Strategi diplomasi "kekinian" menuntut cara-cara baru yang mampu memadu-padankan potensi dan fungsi sumber daya struktur kekuasaan dan kepentingan nasional (*national interest and power structure*) yang pendulum keberhasilannya mengarah kepada daya resepsi (penerimaan) makin besarnya jumlah agen-agen masyarakat jaringan.

Masyarakat jaringan, dalam istilah yang paling sederhana, adalah struktur sosial yang didasarkan pada jaringan yang dioperasikan oleh teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis mikroelektronik dan jaringan komputer digital yang menghasilkan, memproses, dan mendistribusikan informasi berdasarkan pengetahuan yang terakumulasi dalam simpul-simpul jaringan (Castells dan Cardoso, 2005: 7).

Castells (2010: 500) menyimpulkan bahwa masyarakat jaringan merupakan morfologi sosial baru masyarakat kita, dan penyebaran logika jaringan secara substansial memodifikasi operasi dan hasil dalam proses produksi, pengalaman, kekuasaan, dan budaya. Sementara bentuk jejaring dari organisasi sosial telah ada di waktu dan ruang lain, paradigma teknologi informasi baru memberikan dasar material untuk perluasan yang meresap ke seluruh struktur sosial. Lebih jauh lagi logika jaringan ini menginduksi penentuan sosial dari tingkat yang lebih tinggi dari pada kepentingan sosial tertentu yang diekspresikan melalui jaringan: kekuatan arus informasi lebih diutamakan daripada arus kekuasaan.

Bagaimana hubungan antarpelaku diplomasi dengan masyarakat sasaran dan para pemangku kepentingan dalam mengaruskan informasi dapat dijelaskan dalam konsep Strukturasi Anthony Giddens. Di dalam strukturasi hubungan antarindividu yang terlibat dalam proses terbentuknya realitas sosial itu bisa dilihat dari proses strukturasi. Hal utama dalam teori strukturasi adalah hubungan antarpelaku, aktor yang melakukan tindakan secara dinamis, atau keagenan (*agency*) dan struktur (*Structure*) yang berupa relasi dualitas, bukan dualisme. Kalau dualisme cenderung malah saling mempertentangkan antara struktur dan agen. Sementara dualitas itu terjadi dalam praktik sosial yang terus-menerus dan berulang-ulang yang terpolakan sedemikian rupa yang melintasi ruang dan waktu (*time-space distanciation*). Dengan demikian, struktur serta-merta hadir dalam sistem sosial. Struktur juga menjelma dalam pikiran agen yang memiliki pengetahuan yang cukup. Strukturasi meliputi hubungan dialektika antara agen dan struktur, struktur dan agensi adalah dualitas, dan struktur tidak akan ada tanpa keagenan dan demikian sebaliknya. (Giddens, 1984). Dalam konteks berlangsungnya praktik diplomasi di era digital, hubungan dialektis antara struktur dan agen ini bisa dilakukan dalam situasi dan realitas yang meminjam istilah Giddens disebut sebagai *phantasmagoric*. Dia adalah "tempat terjadinya peristiwa sepenuhnya mampu ditembus dan ditentukan oleh pengaruh sosial yang jauh jaraknya dari tempat terjadinya peristiwa itu.

Maka, berdasarkan pemikiran baik mengenai diplomasi *smart power*, masyarakat jaringan dan strukturasi di atas, artikel ini berupaya untuk baru sebatas mengeksplorasi sampai sejauh apa diplomasi digital diperbincangkan dan diimplementasikan baik di lingkungan global maupun nasional.

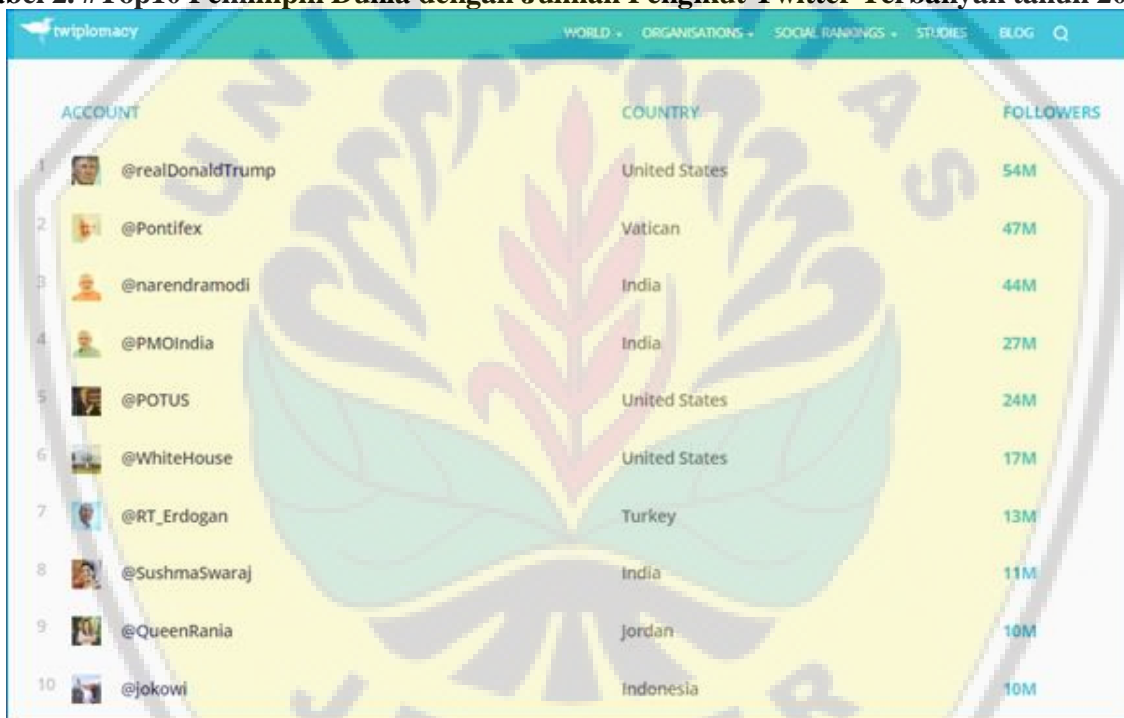
Sebut saja misalnya kemunculan Diplomasi Twitter pada tahun 2011 yang kini populer dengan sebutan "*Twiplomacy*". Twitter sebagai media sosial digital digunakan oleh kepala negara, para pemimpin organisasi internasional, termasuk pula para diplomatnya untuk menjalankan misi diplomatik dan diplomasi publik. Maka dalam konteks ini, diplomasi Twitter telah memainkan peran yang penting dalam komunikasi diplomatik, mulai dari sekadar pengumuman kerja sama bilateral, "kicauan" aktivitas harian pelaku diplomasi, bahkan sampai diskusi panas hingga makian diplomatik. Termasuk pula *hate-speech* dan *bullying* atau komentar negatif yang direaksi oleh *followers* kepada pemilik akun Twitter. Semuanya menggambarkan bagaimana *interplay* tarik-menarik dan interaksi hingga benturan kepentingan terjadi dalam mekanisme diplomasi Twitter.

Firma Komunikasi dan Public Relations Global, Burson-Marsteller (<https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2018/>) melaporkan Semua penghuni dunia ini! Atau hampir 97%

dari semua 193 negara anggota PBB memiliki akun media sosial. Hanya enam negara, yaitu Laos, Mauritania, Nikaragua, Korea Utara, Swaziland (atau Kerajaan Eswatini adalah sebuah negara kecil di selatan Afrika), dan Turkmenistan tidak memiliki akun media sosial. Studi Twiplomacy 2018 mengidentifikasi 951 akun Twitter - 372 akun pribadi dan 579 institusional - kepala negara dan pemerintah dan menteri luar negeri dari 187 negara.

Facebook adalah jaringan paling populer kedua di antara para pemimpin pemerintah dan mereka memiliki audiens terbesar. Kepala pemerintahan dan Menteri Luar Negeri dari 179 negara sangat aktif memanfaatkan platform media sosial, jumlah itu mewakili 93 persen dari semua negara anggota PBB. Instagram berada di urutan ketiga untuk pemerintah dan 81 persen dari semua negara anggota PBB telah membuat akun banyak di antaranya berbagi cerita di Instagram hariannya. Kicauan Presiden Donald Trump punya dampak terbesar di Twitter sejak 20 Januari 2017 dengan akun @realDonaldTrump. Trump adalah pemimpin dunia yang pa ling banyak diikuti dengan lebih dari 52 juta pengikut. Dia telah mengumpulkan paling banyak interaksi selama 12 bulan terakhir, dan tweets-nya rata-rata lebih dari 20.000 retweet. Trump memposting tweet "berita palsu CNN" menjadi paling banyak di retweet (<https://twitter.com/realDonaldTrump/statuses/881503147168071680>) dari pemimpin dunia manapun.

Tabel 2. #Top10 Pemimpin Dunia dengan Jumlah Pengikut Twitter Terbanyak tahun 2018



ACCOUNT	COUNTRY	FOLLOWERS
1 @realDonaldTrump	United States	54M
2 @Pontifex	Vatican	47M
3 @narendramodi	India	44M
4 @PMOIndia	India	27M
5 @POTUS	United States	24M
6 @WhiteHouse	United States	17M
7 @RT_Erdogan	Turkey	13M
8 @SushmaSwaraj	India	11M
9 @QueenRania	Jordan	10M
10 @Jokowi	Indonesia	10M

Sumber: <https://twiplomacy.com/ranking/the-50-most-followed-world-leaders-in-2018/>

Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan catatan dan penelusuran yang penulis lakukan, studi dan penelitian akademik terkait diplomasi digital memang sudah relatif bermunculan. Hanya saja secara kuantitas jumlahnya relatif masih sedikit jika dibandingkan dengan studi dan penelitian tentang *soft power* atau *hard power diplomacy*. Di Indonesia misalnya, studi mandiri maupun penelitian strategis yang dilakukan oleh Kemlu RI tentang diplomasi digital juga tergolong sedikit. Berdasarkan penelusuran dari storage publikasi dan berita di laman resmi <https://kemlu.go.id> setidaknya yang penulis temukan baru ada beberapa tulisan opini atau reportase yang terkait diplomasi digital. Itu pun dua tahun lalu baru mulai muncul beberapa opini atau reportasenya. Pada majalah Masyarakat ASEAN Edisi 16, Agustus 2017 misalnya di rubrik "Pojok Sosialisasi" terdapat laporan bertajuk "*Pemuda ASEAN Bicara Digital Diplomacy*" (Masyarakat ASEAN, 2018: 44).

Di tahun 2018, dua edisinya sudah lebih "padat" isinya yang membahas tentang diplomasi digital sebagai wujud dari *smart power diplomacy*. Pada Edisi 18 terbit bulan April, isinya banyak dipenuhi kajian tentang "*Smart City*" dikombinasikan dengan kearifan budaya lokal. Di

edisi 18 tersebut ada Laporan Utama bertajuk "Inovasi Kunci Ekonomi Digital ASEAN". Juga Reportase yang mengupas "Sombere & Smart City Makassar, Ketika Kearifan Lokal Bertemu Teknologi". Selain itu juga menurunkan ulasan mengenai "Peran Indonesia Membangun ASEAN yang Tangguh dan Inovatif". Edisi nomor 18 majalah yang terbit tiga kali setahun itu memang terbit dengan tema utama "Ketahanan dan Inovasi ASEAN 2018". Tema seperti ini secara konseptual mendekati rumusan diplomasi smart power yang merupakan seni menggabungkan diplomasi hard power dan smart power sebagaimana yang telah penulis paparkan di awal artikel ini.

Sedangkan di edisi terbaru nomor 19 bulan Agustus, Masyarakat ASEAN terbit dengan tema utama "ASEAN Goes Digital". Pada edisi inilah uraian yang bernilai akademis mayoritas sudah memadati pembahasan tentang diplomasi digital. Fernando Alwi, Kepala Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan, Kemlu RI secara khusus menulis kolom opini di edisi ini dengan judul "Diplomasi Digital". Dua artikel lain juga diulas dalam Laporan Utama yaitu "Smart ASEAN" Hadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0" dan "Diplomasi Digital: Citra Suatu Bangsa". Ter masuk menurunkan wawancara dengan Direktur Proteksi Pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai "Kesadaran Keamanan Siber, Raih Peluang Digital Kawasan".

Pemaparan secara agak panjang mengenai terbitan dan *content* dari publikasi Kemlu RI di atas bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, memang baru dalam rentang dua tahun ini diplomasi digital mulai digaungkan di Indonesia. Bahkan dalam acara "Kompasianival" yang berlangsung pada Agustus 2016 di Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Retno L. Marsudi berpidato di pembukaan acara tersebut tentang pentingnya diplomasi digital sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di sebuah negara. Di pidato itu juga Menlu Retno menegaskan terutama ditujukan kepada para diplomat harus bekerja ekstra keras agar mampu beradaptasi dengan tuntutan di era digital sekarang ini, salah satunya dengan bagaimana mengelola dengan sangat baik dalam memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi secara tepat, akurat dan cepat.

Satu tahun kemudian pada April 2017, pidato Menlu Retno itu oleh lembaga riset International Diplomacy.Live dinobatkan sebagai pidato terbaik, "Best Foreign Minister Speech of The Year". Lembaga yang setiap tahun sejak 2009 mengeluarkan daftar peringkat pelaku diplomasi internasional bertajuk The State of Digital Diplomacy (SODD) (dapat diakses di alamat URL <http://diplomacy.live>) ini memang menjadi salah satu lembaga yang otoritatif dan pay attention to much pada perkembangan diplomasi digital. Terutama fokus pada upaya dan riset pengembangan model-model pemanfaatan teknologi digital yang digunakan dalam aktivitas diplomasi (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/04/16/pidato-menlu-retno-tentang-diplomasi-digital-jadi-pidato-terbaik-tahun-2016>, diakses pada 1 Desember 2018).

Menurut pengamatan penulis, setelah capaian penghargaan itu Kemlu RI pada Juli 2017 menggelar seminar yang bekerjasama dengan Pulse Lab Jakarta dan DIPLOFoundation dihadiri korps diplomatik, perwakilan Kementerian dan Lembaga, organisasi masyarakat sipil dan organisasi swasta, termasuk Profesor Jovan Kurbalija, Direktur dan Pendiri DiploFoundation; serta Derval Usher, Kepala Pulse Lab Jakarta. Menurut Jovan Kurbalija diplomasi digital memiliki peluang dan potensi yang lebih besar dari sekadar pemanfaatan tren media sosial. Di seminar itu Menlu Retno menekankan bahwa inovasi dan diplomasi digital telah menjadi kebutuhan!

Sejak 2017 itulah, hemat penulis Pemerintah RI makin serius menggarap diplomasi digital sebagai salah satu instrumen dan strategi penting dalam kebijakan politik luar negeri. Bahkan menurut Achmad Ramadhan pejabat Direktorat Informasi dan Media Kemenlu RI, sejak pertengahan April 2018, Kemenlu telah memanfaatkan diplomasi digital untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dengan meluncurkan platform aplikasi "Safe Travel" (<http://safetravel.id>) yang berbasis multiplatform (website dan aplikasi telepon pintar berbasis Android di google play store). Sebelum menggunakan aplikasi "Safe Travel", Kemenlu juga telah memanfaatkan layanan digital melalui website dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Youtube. Layanan ini tidak hanya dipakai dalam kondisi darurat saja, tetapi juga berisikan informasi praktis yang diperlukan WNI. Mereka bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai berbagai negara di dunia, informasi kontak perwakilan RI, hukum dan tata aturan yang

berlaku di masing-masing negara, mata uang setempat, tempat ibadah, lokasi wisata, sampai informasi kuliner. Dengan demikian, Indonesia adalah pelopor diplomasi digital di kawasan ASEAN (<https://swa.co.id/swa/business-strategy/indonesia-pelopor-diplomasi-digital-di-asean>, diakses 1 Desember 2018).

Begitulah beberapa deskripsi tentang perkembangan terkini penerapan diplomasi digital di Indonesia. Berikutnya akan dipaparkan sekelumit tentang studi akademik mengenai diplomasi digital dan beberapa implementasi yang dilakukan oleh pelaku diplomasi internasional dalam menghadapi realitas politik luar negeri maupun isu-isu global yang berpotensi beririsan dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri antarnegara.

Diplomasi digital bukanlah sekadar penggunaan piranti dan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas diplomasi publik. Jika kembali merujuk pada trajektori diplomasi *smart power* yang mengintegrasikan strategi diplomasi *hard* dan *soft power*, maka sangat jelas diplomasi digital memerlukan tidak hanya pemahaman dan penguasaan teknis atas piranti digital, namun lebih dari itu adalah kecakapan dalam berkomunikasi, pertimbangan yang matang dan terukur tentang diseminasi informasi, dampak penetrasi, analisis jaringan, *profiling* warga net, termasuk juga daya jangkau dan kemampuan pesan diplomasi yang memiliki *impact factor* dalam membentuk kesadaran dan tindakan kolektif sesuai dengan tujuan diplomasi itu.

Studi Cristina Archetti's (2012) membahas "*The Impact of New Media on Diplomatic Practice*" merupakan salah satu hasil riset awal tentang diplomasi digital. Fokus utama studi ini pada bagaimana pemerintah dan kalangan profesional Swedia memanfaatkan laman Facebook dengan fitur video clip-nya untuk mengembangkan pesan-pesan komunikasi pembangunan terkait dengan misi kemanusiaan PBB. Sedangkan tesis master Helen Hoffmann (2013) berjudul "*Twitter as an Instrument of Public Diplomacy: A Case Study of Sweden and Germany*" merupakan salah satu hasil riset awal tentang diplomasi digital. Pada intinya tesis Hoffmann itu berupaya mengeksplorasi apa saja yang dapat Twitter tawarkan untuk diplomasi publik yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan di Swedia dan Jerman. Salah satu simpulan dari studi itu menegaskan bahwa para pelaku diplomasi publik di Swedia dan Jerman menyatakan Twitter itu sangat efisien dan efektif serta murah untuk para diplomat mendiseminasikan informasi sekaligus membangun ruang dan waktu untuk dialog dan interaksi.

Sementara di Indonesia, penelitian yang fokus pada diplomasi digital relatif masih minim jumlahnya. Mungkin saja karena *leading sector* diplomasi yaitu Kemenlu RI juga relatif mulai menggiatkan diplomasi digital dalam dua-tiga tahun belakangan. Maka tak heran ketika dilakukan studi Evaluasi terhadap indikator diplomasi digital yang dilakukan oleh Kemenlu RI, ditemukan bahwa Indonesia berada di tahapan menengah (*middle stage*) (Dwikarna dkk, 2017). Dengan begitu, gaung implementasi diplomasi digital kurang menggema resonansinya.

Meski demikian artikel ini mencatat penelitian Dwikardana dkk. (2017) tersebut yang berjudul "*Transformasi Strategi Diplomasi di Era Digital, Identifikasi Postur Diplomasi Digital di Indonesia*", patut kita apresiasi untuk membuka ruang studi diplomasi digital lebih luas lagi. Studi para akademisi Unika Parahyangan Bandung ini berupaya melihat aktivitas Kemenlu RI di media sosial, seperti Twitter dan Facebook. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kemenlu RI telah melakukan diplomasi digital secara aktif dengan mempertimbangkan berbagai indikator. Namun, dalam hal pelaksanaan masih perlu didukung oleh setidaknya beberapa faktor, seperti: infrastruktur, dana insentif, serta SDM yang lebih mumpuni.

Kajian lainnya dilakukan oleh Syaifani dan Qubba (2017) dengan mencermati bagaimana penggunaan diplomasi digital Presiden Joko Widodo. Judul kajiannya "*Joko Widodo's Digital Diplomacy: A Prospect and Challenge for Indonesia's Digital Diplomacy towards Middle Power*".

Dari sejumlah kajian yang telah dipublikasikan, hemat penulis proyek riset diplomasi digital yang relatif komprehensif adalah yang dikelola oleh lembaga riset Universitas Oxford. Mencermati content di <https://digdipblog.com> kita dapat menjumpai time-line yang padat dengan topik-topik kajian yang spesifik dan menarik untuk mendalami praktik diplomasi digital yang dilakukan oleh beragam aktor-aktor diplomasi. Setidaknya proyek riset yang dikomandani oleh

pakar komunikasi Ilan Manor ini memang bertujuan untuk berupaya memahami bagaimana para menteri luar negeri di dunia saat ini menggunakan diplomasi digital dengan berbagai platform media digital. Beragam topik diteliti serius terutama terkait analisis isi atas apa yang ditulis, dikomentari, atau diunggah para Menlu maupun pemimpin dunia pada media digital mereka (Twitter, Facebook, Instagram, Google+, maupun V-Log) hingga selaras dengan pesan-pesan dan misi kebijakan politik luar negeri termasuk daya jangkauan dan respon dari khalayaknya.

Ilan Manor dapat penulis katakan sebagai ilmuwan yang sangat produktif meneliti diplomasi digital. Tesis master Manor mengeksplorasi soal adab kesantunan yang banyak bangsa di dunia ini gambarkan melalui platform diplomasi digital selama masa-masa krisis. Manor juga meneliti tentang *"Selfie Diplomacy"*, atau manner yang diekspresikan oleh berbagai bangsa di media sosial sebagai aktivitas nation branding. Tentang diplomasi selfi Manor ini terdapat dalam buku *Digital Diplomacy: Theory and Practice* (Bjola dan Holmes, 2015). Pada 2016, Manor menerbitkan monograf tentang diplomasi digital berjudul *"Are we there yet? Have MFAs Realized the Potential of Digital Diplomacy?"* Monograf ini berisi analisis mendalam aktivitas-aktivitas digital dari empat Menteri Luar Negeri yaitu: Israel, Polandia, Finlandia and Norwegia.

Bahkan mungkin baru dia lah yang merumuskan secara lebih komprehensif bagaimana terminologi diplomasi digital itu mulai berkembang hingga tidak jarang digunakan secara tumpang tindih. Melalui kertas kerjanya yang berjudul *"The Digitalization of Diplomacy: Toward Clarification of a Fractured Terminology"*, Manor (2017) meneliti bagaimana selama bertahun-tahun penggunaan istilah diplomasi digital disimplifikasi sebatas pada pengaruh teknologi digital terhadap diplomasi. Beberapa istilah lebih fokus pada konseptualisasi diplomasi di dunia digital. Amerika Serikat menggunakan *"networked diplomacy"* dan *"21st century statecraft"*. Istilah lainnya justru malah berpusat pada karakteristik teknologi digital semata. Contohnya, *"public diplomacy 2.0"*, yang sebenarnya menggambarkan nama konsep dari web 2.0; juga ada istilah *"net diplomacy"*, yang lebih terkait dengan piranti maupun aplikasi internet; ada juga *"Twiplomacy"* yang merujuk pada media mikroblog Twitter. Beberapa istilah diatribusikan pada konteks aktivitas atau kebiasaan masyarakat digital, misalnya *"selfie diplomacy"* dan *"real time diplomacy"*. Contoh terakhir juga marak dijumpai penggunaan istilah *"cyber diplomacy"* yang sebenarnya lebih terkait dengan arena atau medan baru aktivitas diplomatik.

Atas berbagai fraktur atau tidak beraturannya penggunaan terminologi diplomasi digital itu, Manor kemudian mengajukan istilah yang lebih sistematis berdasarkan pendekatan ilmiah ketika mengkaji dampak teknologi digital pada diplomasi. Maka Manor mengajukan istilah "digitalisasi diplomasi" (*"the digitalization of diplomacy"*). Istilah digitalisasi diplomasi memungkinkan bagi para akademisi melakukan pemetaan korpus penelitian dan menginvestigasi ruang lingkup baru. Istilah itu juga cukup luwes yang dapat digunakan dan dieksplorasi lebih lanjut sebagai agenda riset baik oleh sarjana studi diplomasi, hubungan internasional dan ilmu komunikasi.

Dengan konsepsi yang ditawarkan oleh Manor ini, hemat penulis diplomasi digital sangat potensial membuka peran baru yang dapat dijalankan oleh pelaku-pelaku baru dengan strategi-strategi baru untuk menjalankan fungsi dan tujuan diplomasinya.

Sebut saja misalnya, Diplomasi yang dilakukan terutama oleh Mantan Wakil Presiden Al Gore terkait dengan pemanasan global ini menarik untuk diteliti lebih mendalam. Pasalnya, selain karena sosok Al Gore yang memang sudah sejak lebih dari 30 tahun lalu konsisten menjalankan aktivitas upaya pengendalian perubahan iklim dan pencegahan atas dampak pemanasan global, juga karena munculnya strategi baru dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi berupa berbagai platform media digital.

Kiprah Al Gore yang penulis katakan lebih dari 30 tahun tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya publikasi buku, artikel jurnal, dan film dokumenter dari tahun 1992 sampai tahun 2017. Hampir seluruh karya Al Gore berkaitan dengan "kegelisahan" dan "kecemasan" Al Gore yang diikuti penelitian komprehensif mengenai perlawanan dan upaya pengendalian *Global Warming* dan perubahan iklim. Tahun 1992 menjadi tahun pertama terbitnya publikasi buku yang ditulis Al Gore. Setahun sebelum terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Bill

Clinton dalam pemilu Amerika Serikat 1993. Buku pertama tersebut berjudul *“Earth In the Balance Ecology and Human Spirit”*. Buku yang pada intinya berisi penyebaran pengetahuan tentang keseimbangan ekologis dan upaya untuk mengantisipasi sekaligus menemukan solusi atas perubahan iklim.

Sementara itu hal menarik lainnya pada sosok Al Gore adalah komitmen dan konsistensinya untuk mendiplomasikan isu pemanasan global pada publik dunia Ia lakukan dengan menggunakan media digital berupa dua karya film dokumenter yang terus menerus didiseminasikan dari tahun 2006 sampai saat ini melalui sejumlah Workshop di berbagai negara dan kawasan dunia. Kedua film dokumenter tersebut adalah tahun 2006 berjudul *“An Inconvinience Truth”* dan pada tahun 2017 bertitel *“An Inconvinience sequel : Truth to Power”*. Lewat film dokumenter *“An Inconvinience Truth” (2006)* , pada tahun 2007 Al Gore berhasil dinobatkan sebagai peraih nobel perdamaian dunia berkat perjuangannya dalam mendiplomasikan upaya perlawanan dan pengendalian pada pemanasan global dan perubahan iklim.

Melalui kedua film itu, Al Gore boleh dicatat sebagai pelaku diplomasi lingkungan yang sukses membentuk kesadaran kolektif dan tindakan kolektif masyarakat jaringan dan para pemimpin global dalam upaya menghadapi dan mengendalikan isu pemanasan global dan perubahan iklim. Semua pesan-pesan diplomasi lingkungan Al Gore didiseminasikan melalui platform media digital dengan akun resmi miliknya. Al Gore memanfaatkan website www.algore.com untuk menyuarakan berbagai aktivitas pengendalian dan pelestarian masa depan bumi. Al Gore juga menggunakan platform mikroblog Twitter (<https://twitter.com/algore>), Facebook (<https://www.facebook.com/algore>), Instagram (<https://www.instagram.com/algore>), dan Google+ (<https://plus.google.com/+AlGore>).

Contoh lain misalnya dalam forum Panel antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) juga dimanfaatkan oleh Sir David Attenborough, ahli lingkungan dan mantan jurnalis BBC dengan mempromosikan fitur percakapan (chatting) <http://actnow.bot>. Fitur interaktif dan responsif yang digagas oleh PBB tersebut dapat menjawab pertanyaan masyarakat tentang cara melawan perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari melalui platform Facebook Messenger. Selain itu, fitur ini juga dapat menjadi pilihan untuk berpartisipasi melestarikan lingkungan dan dapat dibagikan dengan pengikut media sosial lain. Dengan kemudahan akses informasi, semakin banyak orang mendapat pengetahuan dan keberanian untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. (<http://www.un.org/en/climatechange/take-action.shtml>). Bagi Attenborough, kelestarian bumi harus dijaga untuk menjaga peradaban dunia. Bahaya perubahan iklim digambarkannya sebagai *the collapse of civilization and the extinction of much of the natural world* (The Guardian, 3 Desember 2018).

Bahkan pada 18 September 2016 di New York University School of Law, Al Gore berpidato yang intinya menyerukan pemimpin dan publik dunia bahwa Pemanasan Global bukanlah isu politik, tapi isu moral! Isu moral ini akan sangat berpengaruh pada kelangsungan peradaban manusia dan kemanusiaan. Isu moral ini harus diperjuangkan dengan mengambil tindakan-tindakan nyata demi masa depan generasi mendatang.

“This is not a political issue. This is a moral issue. It affects the survival of human civilization. It is not a question of left vs. right; it is a question of right vs. wrong. Put simply, it is wrong to destroy the habitability of our planet and ruin the prospects of every generation that follows ours.” (Gore Speech, www.algore.com/news).

Inilah yang membuat penulis memandang penting penelitian ini untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan aktivisme Al Gore dengan menyerukan dan mengajak tindakan kolektif pemimpin dan publik dunia dalam menghadapi pemanasan global.

Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Al Gore pada 7 Oktober 2018 juga memberikan peringatan keras dalam Laporan Khusus The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tentang Pemanasan Global. Secara lengkap pernyataan Al Gore sebagaimana yang dirilis di laman resmi <https://algore.com/news/> tersebut dapat penulis paparkan sebagai berikut:

“Today the world’s leading scientific experts collectively reinforced what Mother Nature has made clear – that we need to undergo an urgent and rapid transformation to a

global clean energy economy. The Paris Agreement was monumental, but we must now go further, ratchet up commitments and develop solutions that meet the scale of the climate crisis. The report will encourage the development of new technologies, which is important. However, time is running out, so we must capitalize and build upon the solutions available today. Solving the climate crisis requires vision and leadership. Unfortunately, the Trump administration has become a rogue outlier in its shortsighted attempt to prop up the dirty fossil fuel industries of the past. The administration is in direct conflict with American businesses, states, cities, and citizens leading the transformation.”

“Hari ini para ahli ilmiah terkemuka di dunia secara kolektif memperkuat apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Pertiwi – bahwa kita perlu menjalani transformasi yang mendesak dan cepat menuju ekonomi energi bersih global. Kesepakatan Paris itu monumental, tetapi sekarang kita harus melangkah lebih jauh, meningkatkan komitmen dan mengembangkan solusi yang memenuhi skala krisis iklim. Laporan Paris ini akan mendorong pengembangan teknologi baru, yang penting. Namun, waktu hampir habis, jadi kita harus memanfaatkan dan membangun solusi yang tersedia saat ini. Memecahkan krisis iklim membutuhkan visi dan kepemimpinan. Sayangnya, pemerintahan Trump menjadi jahat dalam usahanya yang sempit untuk menopang industri bahan bakar fosil yang kotor di masa lalu. Pemerintahan Trump berada dalam konflik langsung dengan bisnis, negara bagian, kota, dan seluruh warga Amerika yang justru tengah memimpin transformasi.”

Kedua pernyataan keras dan sangat penting di atas merupakan ekspresi keprihatinan dan sekaligus kepedulian kedua tokoh aktivis lingkungan itu terhadap masa depan bumi dari ancaman nyata fenomena pemanasan global dan perubahan iklim. Kedua pernyataan itu memang diserukan kepada para pemimpin dunia di tengah forum internasional Panel antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Forum tersebut merupakan panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB, World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) yang secara intensif melakukan evaluasi atas risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur atau dokumen teknis dan ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan.

KESIMPULAN

Bagi Giddens, objektivitas struktur tidak bersifat eksternal, melainkan melekat pada tindakan dan praktek sosial yang kita lakukan. Struktur bukanlah sesuatu yang bentuknya fisik, melainkan semacam skemata yang hanya tampil dalam praktek-praktek sosial (Giddens, 1984).

Trajektori studi diplomasi mengalami perubahan dan dinamika yang pesat. Dari diplomasi *hard power* menjadi *soft power* dan saat ini berubah menjelma sebagai diplomasi *smart power*. Perubahan studi diplomasi yang sangat spektakuler ini, sekali lagi, tidak mungkin bisa terjadi bila tidak didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi. Perubahan ini pula yang melahirkan wajah baru diplomasi digital. Arus globalisasi beserta teknologi informasi dan komunikasinya memberikan sebuah fenomena baru, yakni konstrain atau kendala waktu dan ruang yang sebelumnya menjadi kendala bagi masyarakat lokal dan global hingga ada batas jarak, ruang dan waktu, kini bisa diatasi dengan perangkat teknologi internet dan digital. Apa yang terjadi di wilayah tertentu di dunia ini atau lokal merupakan cermin dari apa yang terjadi pada tataran global.

Di era digital inilah memungkinkan ruang dan waktu mengalami batas-batas keaburannya. Hubungan antara struktur power dan agen society yang secara fisik menjadi tidak nampak oleh karena adanya jarak dan waktu, kini menjadi sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu tempat (*space*) menjadi sebuah *phantasmagoric*. “Tempat terjadinya peristiwa sepenuhnya ditembus dan ditentukan oleh pengaruh sosial yang jauh jaraknya dari tempat terjadinya peristiwa itu”

Patut ditegaskan kembali di sini bahwa konsepsi dalam teori *structuration* yang dikemukakan Giddens berkaitan dengan realitas *phantasmoric* ini. Dalam teori strukturasi diuraikan tiga

konsepsi penting yang menandai sebuah modernitas, yaitu *distanciation*, *disembedding* dan *reflexivity*. *Distanciation* dalam pengertian yang diberikan oleh Giddens adalah adanya pemisahan antara waktu dan ruang. *Distanciation* yang disebabkan adanya perbedaan antara waktu dan ruang ini mempunyai sifat yang dialektikal dan tidak unilinier. Dalam modernisasi, pemisahan antara ruang dan tempat sangat mungkin terjadi, atau kaitan antara ruang dan waktu diputus. Dengan hadirnya modernitas, ruang makin lama makin dilepaskan dari tempat, dan hal ini memungkinkan, misalnya, hubungan antar orang yang berjauhan jarak fisiknya.

Maka demikianlah pembahasan mengenai diplomasi digital sejatinya telah membuka banyak peluang dan inovasi-kreasi baru, strategi-strategi baru, aktor-aktor baru terutama dalam aktivitas diplomasi dan upaya mendiseminasikan kebijakan luar negeri. Dikatakan serba baru lantaran terjadinya interaksi dan komunikasi antara struktur dan agen dalam sistem global telah mengalami apa yang disebut Giddens sebagai dualitas strukturasi. Sesuatu yang bukan untuk dipertentangkan posisi dan fungsinya, melainkan lebih saling melengkapi dan saling mengambil daya manfaat dari perkembangan diplomasi digital di era disrupsi teknologi ini. Publik yang menjadi sasaran diplomasi dan kebijakan luar negeri di era digital bukanlah publik yang pasif, statis dan obyek kekangan bahkan “pelengkap penderita”. Juga bukan konsumen semata. Sebaliknya, publik dalam diplomasi digital juga berperan sangat aktif progresif yang mampu menjadi produsen. Mampu memproduksi dan mereproduksi wacana dalam skala kehidupan dunia. Publik dalam diplomasi digital adalah Prosumen, produsen dan konsumen sekaligus. Oleh karena itu, para pemegang keputusan politik dan kebijakan luar negeri, hemat penulis sudah saatnya membuka diri pada entitas diplomasi digital yang memungkinkan terbentuknya *network society* pada lingkungan pesan-pesan diplomasinya dapat mengambil banyak manfaat dan prestasi gemilang yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan publik itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Archetti's, Cristina (2012). The Impact of New Media on Diplomatic Practice: An Evolutionary Model of Change. *The Hague Journal of Diplomacy* 7 (2012) 181-206
- Bjola, Corneliu dan Holmes, Marcus (2015). *Digital Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Routledge
- Castells, Manuel dan Cardoso, Gustavo, eds. (2005). *The Network Society: From Knowledge to Policy*. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations
- Dwikardana dkk. (2017). Transformasi Strategi Diplomasi di Era Digital: Identifikasi Postur Diplomasi Digital di Indonesia. *Laporan Penelitian Hibah Monodisiplin*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan
- Giddens, A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, Anthony (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Hoffmann, Helen (2013). Twitter as an Instrument of Public Diplomacy: A Case Study of Sweden and Germany. *Master of Arts Thesis Euroculture*. Erasmus Mundus Euroculture
- Hopf, Ted (2002) *Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999*. Ithaca: Cornell University Press.
- Huberman, A. Michael dan Miles, Mathew B. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd Edition*. London: Sage Publication, Inc.
- Klotz, Audie (2004) “*State Identity in South African Foreign policy*”. http://www.queensu.ca/samp/migrationresources/Documents/Klotz_state.pdf, diakses 30 November 2018.
- Manor, I. (2017, August). The Digitalization of Diplomacy: Toward Clarification of a Fractured Terminology. *Working Paper. Exploring Digital Diplomacy*.
- Manor, I. (TT). What is Digital Diplomacy? Retrieved desember 09, 2018, from digdipblog.com: <https://digdipblog.com/countries-on-twitter-and-facebook/>
- McClory, J., (2011). *The New Persuaders II. A 2011 Global Ranking of Soft Power*. Institute for Government [pdf]
- Nye, J. S Jr., (1990). Soft Power. *Foreign Policy*, 80 [pdf]

- Nye, J. S.Jr., (2004), *Soft Power: the means to success in world politics*, NewYork: Public Affairs. Nye, J. S. Jr., (2008). *Public Diplomacy and Soft Power. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616 (94) [pdf]
- Nye, J.S. Jr. dan Armitage, R.L., (2007). *CSIS Commission on Smart Power. A smarter, more secure America Center for Strategic and International Studies*, Washington [pdf]
- Nye, Joseph S. (2008). *The powers to Lead*. Oxford, New York: Oxford University Press
- Pallaver, Matteo (2011). *Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart*. London: London School of Economics for the degree of Master of Philosophy.
- Partiadi, Himawan; Hara, Abubakar Eby and Iqbal, Muhammad (2016). 'Evaluasi Efektifitas Kemitraan Strategis/Komprehensif Indonesia Dengan Negaranegara Di Kawasan Asia Pasifik Dan Afrika'. *Laporan Penelitian* kerjasama BPPK Kementerian Luar Negeri RI dengan Laboratorium Kajian Politik dan Kawasan (LKPK) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik - Universitas Jember.
- Prasetyo, A. Y. (2018, Desember 07). Misi Menyelamatkan Bumi. Retrieved Desember 09, 2018, from Kompas.id: <https://kompas.id/baca/riset/2018/12/07/misi-menyelamatkan-bumi/>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Raimzhanova, Aigerim (2015). *Power in Ir: Hard, Soft, and Smart*. http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova,-A.pdf diakses 30 November 2018
- Syaifani, Sasha & Qubba, Naaimatur Rofiani (2017). Joko Widodo's Digital Diplomacy: A Prospect and Challenge for Indonesia's Digital Diplomacy towards Middle Power. *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun X, No.2, Juli - Desember
- Sumber Internet:
<http://actnow.bot>
<http://diplomacy.live>
http://krjogja.com/web/news/read/71640/Menlu_Diplomasi_Digital_Telah_Menjadi_Kebutuhan diakses 30 November 2018
<http://safetravel.id>
<http://www.un.org/en/climatechange/take-action.shtml>
<https://algore.com/news/> diakses 30 November 2018
<https://digdipblog.com>
<https://kemlu.go.id>
<https://plus.google.com/+AlGore>
<https://swa.co.id/swa/business-strategy/indonesia-pelopori-diplomasi-digital-di-asean> diakses 30 November 2018
<https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2018/> diakses 2 Desember 2018
<https://twiplomacy.com/ranking/the-50-most-followed-world-leaders-in-2018/> diakses 30 November 2018